Jurnal INDONESIA RAYA
(Community Service in the Social, Humanities, Health, Economy and General Areas)
Available online at : http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/indonesiaraya
DOI: https://doi.org/10.37638/Indonesiaraya.4.1.11-16

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG

Fachruzzaman[1)*], Eddy Suranta[2)], Abdullah[3)], Nikmah[4)], Pratana Puspa Midiastuty[5)], Isma Coryanata[6)]
[1,2,3,4,5,6)]Universitas Bengkulu, Indonesia
*Corresponding author: fachruzzaman.ca@unib.ac.id

ARTICLE HISTORY
Received : May 21, 2023
Revised : May 29, 2023
Accepted : June 10, 2023

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan usaha, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataanya BUMDes yang ada di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang belum secara optimal memberikan kontribusinya. Kegiatan BUMDes hanya menjalankan usaha simpan pinjam dan toko menjual sembako dengan skala kecil. Permaslahan yang dihadapi oleh BUMDes yaitu kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat desa khususnya di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan pelatihan pada kepala desa, perangkat desa, pengelola BUMDes dan perwakilan anggota masyarakat di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebanyak 40 orang. Hasil dari pengabdian ini tentunya BUMDes sebagai badan usaha yang memanfaatkan dana desa dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat dan desa. Adanya komitmen bersama dari seluruh warga desa untuk menjadikan desa mereka memiliki usaha yang dijalankan melalui BUMDes yang modalnya bukan saja berasal dari dana desa juga bisa berasal dari investasi masyarakat desa maupun dari dana pinjaman. BUMDes dapat mengatasi permasalahan-permasalahan BUMDes terkait dengan pembayaran gaji bagi pengelola BUMDes, Optimalisasi pengelolaan potensi wisata, dan BUMDes supaya dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan terutama BUMDes yang bergerak dibidang usaha jual beli sembako.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes, Ujan Mas*

I. PENDAHULUAN

Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam

Jurnal INDONESIA RAYA
(Community Service in the Social, Humanities, Health, Economy and General Areas)
Available online at : http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/indonesiaraya
DOI: https://doi.org/10.37638/Indonesiaraya.4.1.11-16

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaaan dan perekonomian desa.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh untuk Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 16 desa, hanya terdapat 5 (desa) yang sudah memiliki BUMDes sedangkan untuk desa-desa yang lain belum membentuk BUMDes. BUMDes yang ada sudah adapun hanya menjalankan usaha simpan pinjam dan toko yang menjual sembako dengan skala yang masih kecil. Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi BUMDes di Kecamatan Ujan Mas masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan dana BUMDes masih belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari usaha BUMDes yang dijalankan di Kecamatan Ujan Mas tersebut yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Ujan Mas yang masih rendah karena masyarakat desa ini rata-rata bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh dan pedagang kecil serta pengangguran yang masih usia produktif, diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta dapat membentuk lembaga struktur BUMDes di desa-desa yang ada pada Kecamatan Ujan Mas.

Jurnal INDONESIA RAYA
(Community Service in the Social, Humanities, Health, Economy and General Areas)
Available online at : http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/indonesiaraya
DOI: https://doi.org/10.37638/Indonesiaraya.4.1.11-16

II. METODE

Sasaran yang diundang pada pelatihan ini adalah para kepala desa, perangkat desa, pengelola BUMDes dan perwakilan anggota masyarakat di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebanyak 40 orang. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya peningkatan pemahaman mereka tentang arti penting BUMDes bagi pemberdayaan masyarakat dan pemahaman mereka tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakasanakan di Balai Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan pembicaraan dengan kepala desa, sekretaris desa, ketua LKMD dan pengelola BUMDes selaku kelompok sasaran untuk mencapai kesepakatan. Pada tahapan ini, tim dibantu oleh beberapa mahasiswa S1 Akuntansi untuk memperoleh gambaran awal tentang BUMDes di desa-desa yang ada pada Kecamatan Ujan Mas. Selanjutnya tim menemui kepala bidang pemberdayaan desa Kabupaten Kepahiang. Hasil diskusi dengan kepala bidang tersebut mengarah pada pengidentifikasian permasalahan dan solusi yang dapat ditawarkan kepada kelompok sasaran. Langkah selanjutnya adalah menemui kelompok sasaran untuk keperluan persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Adapun sistematika pelaksanaan yang direncanakan untuk kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1) Sesi 1: Pemateri memberikan penjelasan tentang pentingnya BUMDes bagi pemberdayaan masyarakat desa, penjelasan yang berkaitan dengan pengenalan BUMDes dan bagaimana proses pendirian BUMDes. Materi ini diberikan sekitar 60 menit. Pemateri memberikan contoh konkrit desa-desa yang sukses menghasilkan PADes melalui BUMDes melalui penampilan gambar dan video sekitar 30 menit.
2) Sesi 2: Pemateri memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya terkait permasalahan dan kendala yang mereka hadapi sehingga kesadaran untuk mendirikan BUMDes masih rendah. Tanya jawab dan diskusi ini diselenggarakan selama 30 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan pelatihan kepada para pengelola BUMDes tentang pengelolaan BUMDes yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan keinginan masyarakat di 16 desa di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk menjadikan BUMDes yang sudah mereka dirikan menjadi badan usaha yang mendatangkan pendapatan bagi desa mereka sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan secara maksimal, maka dilakukan program pelatihan pengelolaan BUMDes kepada para pengelola BUMDes dan para pemuda pelopor desa di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Kegiatan Penyuluhan Pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk Penguatan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Ujan Mas Kepahiang selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Mei dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, bertempat di Balai Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas. Kegiatan ini dihadiri sekitar 40 orang peserta yang berasal dari perwakilan pengelola BUMDes dari 16 BUMDes yang ada di Kecamatan Ujan Mas dan beberapa perwakilan dari pemuda pelopor desa di Kecamatan Ujan Mas.

Kegiatan pengabdian ini dibuka langsung oleh Camat Kecamatan Ujan Mas, Bapak Drs. Endang Sarjana. Camat memberikan arahan kepada pengelola BUMDes untuk memanfaatkan sepenuhnya kegiatan ini untuk bertanya terkait dengan permasalahan yang dihadapi BUMDes di desa mereka, sehingga BUMDes yang sudah berjalan beberapa tahun ini seharusnya sudah dapat menghasilkan pendapatan asli desa, sehingga pendapatan desa tidak hanya berasal dari dana desa dari APBN dan anggaran dana desa dari APBD. Camat juga memberikan gambaran tentang desa-desa di Kecamatan Ujan Mas yang hanya sedikit potensi wisatanya dan sebagian lahan desa digunakan untuk pertanian. Sebagian besar BUMDes yang ada di Kecamatan Ujan Mas hanya mempunyai beberapa

Jurnal INDONESIA RAYA
(Community Service in the Social, Humanities, Health, Economy and General Areas)
Available online at : http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/indonesiaraya
DOI: https://doi.org/10.37638/Indonesiaraya.4.1.11-16

usaha yang masih skala kecil yang bergerak dibidang penyewaan tenda, penjualan sembako ataupun usaha simpan pinjam. Seluruh usaha ini belum dikelola dengan serius sehingga hasil yang diperoleh masih sedikit.

Peran BUMDes sebagai badan usaha yang memanfaatkan dana desa yang ada untuk dikelola sebagai usaha yang menghasilkan pendapatan bagi BUMDes yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan asli bagi desa tersebut. Dana desa yang sejak tahun 2015 sudah dikucurkan bagi semua desa di Indonesia, pada awalnya diperuntukkan untuk infrastruktur atau pekerjaan fisik sehingga setiap desa sudah memiliki infrastruktur yang memadai. Selain itu, desa juga harus berpikir untuk menjadi pelaku bisnis melalui BUMDes, sehingga dana desa yang diterima dari pemerintah seharusnya sudah dijadikan investasi bagi desa dalam menjalankan usaha melalui BUMDes.

Pengelolaan BUMDes dimulai dari adanya komitmen bersama dari seluruh warga desa untuk menjadikan desa mereka memiliki usaha yang dijalankan melalui BUMDes yang modalnya bukan saja berasal dari dana desa juga bisa berasal dari investasi masyarakat desa maupun dari dana pinjaman. Selain itu sebelum memutuskan untuk memilih usaha apa yang akan dijalankan, maka harus benar-benar melakukan analisis potensi desa dan studi kelayakan usaha dengan mempertimbangkan aspek pasar (permintaan dan penawaran), aspek pemasaran, aspek teknis seperti ketersediaan lahan, bahan baku, saran transportasi, serta aspek hukum terkait masalah perizinan seperti izin dari BPOM dan dari MUI.

Setiap desa yang diberikan penyuluhan sudah memiliki BUMDes dan sudah ditunjuk para pengelola BUMDes. Namun yang menjadi permasalahan adalah para pengelola BUMDes ini sebagian besar juga memiliki perkerjaan lain sehingga waktu mereka untuk mengelola BUMDes masih terbatas. Terdapat beberapa alasan kurang bersemangatnya pengelola BUMDes ini disebabkan banyaknya permasalahan dalam menjalankan BUMDes ini yaitu:

a) Permasalahan pembayaran gaji bagi pengelola BUMDes yang hanya boleh dibayarkan dari penghasilan BUMDes, sehingga para pengelola BUMDes yang sebagian besar sudah memiliki keluarga tidak bisa mencurahkan seluruh tenaga dan pemikirannya hanya untuk mengelola BUMDes sehingga mereka tetap menjalankan aktivitas mereka sehari-hari sebagai petani.

b) Di beberapa desa yang memiliki potensi wisata seperti Desa Suro Bali yang di desanya memiliki danau kecil yang berpotensi untuk menjadi tempat rekreasi tidak bisa dikelola oleh BUMDes karena lahan tersebut dikuasai oleh pribadi dan untuk memiliki lahan tersebut BUMDes di desa tersebut tidak sanggup membeli dan jika melalui sistem sewa lahan, biaya sewa yang ditetapkan pemilik lahan juga sangat tinggi sehingga BUMDes tidak sanggup untuk membayar sewa, apalagi pada tahun-tahun awal BUMDes juga harus menginvestasikan dana yang besar untuk membangun sarana pendukung di wisata tersebut.

c) Pengelola BUMDes yang menjalankan usaha jual beli sembako juga mengatakan bahwa usaha mereka belum menghasilkan pendapatan yang mencukupi karena terbatas modal dan banyaknya retail besar seperti Alfamart, Indomaret ataupun grosir sembako yang sudah ada.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh peserta, pemateri memberi tanggapan bahwa kebijakan pembayaran gaji bagi pengelola BUMDes yang hanya diperbolehkan dari hasil usaha BUMDes sudah merupakan aturan, namun bukan berarti pada tahap awal ketika usaha BUMDes lagi dirintis para pengelola ini sama sekali tidak mendapatkan bayaran dari hasil kerjanya. BUMDes dapat mengalokasikan dari investasi awal yang mereka miliki untuk membayar uang lelah dari pengelola BUMDes ini. Pemateri mencotohkan di beberapa BUMDes yang sukses di daerah Yogyakarta, pengelola BUMDes-nya rata-rata meninggalkan pekerjaan sebelumnya sebagai karyawan untuk menjalankan BUMDes karena mereka memiliki semangat berwirausaha yang tinggi melalui BUMDes, bahkan saat ini manajer BUMDes di Desa Panggung Harjo Kabupaten Bantul sudah bergaji di atas 100 juta per bulan.

Kecamatan Ujan Mas sangat potensial untuk mengembankan usaha wisata edukasi dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk usaha agrowisata dan peternakan sapi perah seperti di kawasan Lembang Bandung. Hasil perahan susu sapi ini bisa diolah menjadi produk-produk yang dapat di pasarkan di mini market di seluruh Bengkulu. Untuk memberikan bimbingan terkait dengan

Jurnal INDONESIA RAYA
(Community Service in the Social, Humanities, Health, Economy and General Areas)
Available online at : http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/indonesiaraya
DOI: https://doi.org/10.37638/Indonesiaraya.4.1.11-16

bagaimana memulai usaha peternakan sapi perah dan pengolahan produk dari susu sapi perah, pihak Universitas Bengkulu khususnya Jurusan Peternakan siap untuk memberikan pendampinga kepada warga desa.

Untuk menjadikan BUMDes yang besar, maka BUMDes yang sudah ada di 16 desa di Kecamatan Ujan Mas juga dapat berkolaborasi dan bergabung menjadi satu BUMDes yang besar sehingga dengan investasi yang besar dapat menjalankan usaha dengan skala besar, mengefisiensikan biaya terkait pengelolaan dan mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar karena biaya produksi yang bisa ditekan karena sumber bahan baku tersedia di Kecamatan Ujan Mas.

Kegiatan pengembangan BUMDes yang ada di Kecamatan Ujan Mas diharapkan dapat ditindaklanjuti PKM selanjutnya dengan membuat pendampingan dan pelatihan yang dapat menunjang berdirinya BUMDes yang baik. Tujuannya adalah menjadikan desa-desa pada Kecamatan Ujan Mas memiliki tingkat perekonomian mandiri yang baik. Untuk kedepannya, sebaiknya para akademisi atau pihak universitas memfasilitasi desa-desa untuk pengembangan lembaga yang ada di desa karena menurut pengamatan penulis, masih sangat jarang program-program yang bernuansa pengembangan manajemen bagi lembaga di desa. PKM yang cukup sering dilakukan di desa biasanya menyasar sektor UMKM atau sektor usaha, padahal, lembaga seperti BUMDes juga memerlukan pembimbingan atau konsultasi dari pihak akademisi. Implikasi pendampingan ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masayarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Pengelolaan BUMDes harus diawali dengan adanya komitmen bersama dari warga desa, semangat dan jiwa berwirausaha, semangat pantang menyerah dan kemampuan dalam menggali potensi desa yang akan dikelola oleh BUMDes untuk menjadi usaha berskala besar dalam mengciptakan pendapatan bagi desa sehingga menjadi desa yang mandiri.

Adapun beberapa saran dari kegiatan pengabdian ini antara lain:

1) Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di Kecamatan Ujan Mas segera membentuk pengelolaan BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDes untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.
2) Bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes ini, kemudian memberikan pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40.

Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.

Jurnal INDONESIA RAYA
(Community Service in the Social, Humanities, Health, Economy and General Areas)
Available online at : http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/indonesiaraya
DOI: https://doi.org/10.37638/Indonesiaraya.4.1.11-16

Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3), 61-72.

Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDES). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.

PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.

Sa'dullah. (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available: http://www.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio_visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan. Accessed 28 Juni 2019.

Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), 717-728

Sidik, F., 2015, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 19 No. 2: 115 – 131*